

SKRIPSI

**ANALISIS PERJANJIAN PENGADAAN ALAT KESEHATAN (*PATIENT
MONITOR*) ANTARA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
DR. RASIDIN PADANG DENGAN PT. MULIA HUSADA JAYA**

Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ANA YULIANA SABDA

1610111149

Program Kekhususan : Hukum Perdata (PK I)



Pembimbing :

Dr. Dahlin Marjon, S.H., M.H

Dr. Yasniwati, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2020

**ANALISIS PERJANJIAN PENGADAAN ALAT KESEHATAN (*PATIENT MONITOR*) ANTARA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) DR. RASIDIN PADANG DENGAN PT. MULIA HUSADA JAYA
(Ana Yuliana Sabda, 1610111149, Fakultas Hukum, 2020, 69 halaman)**

ABSTRAK

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata), perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Salah satu bentuk perjanjian itu adalah perjanjian atau kontrak pengadaan barang dan jasa (*procurement*). Dalam pelaksanaannya, apa yang dicita-citakan, apa yang harus ada nanti (*das sollen*) dan apa yang menjadi kenyataan atau keadaan yang sebenarnya pada waktu sekarang (*das sein*) atau untuk singkatannya arti dari keduanya adalah yang ada dan yang seharusnya di lapang maupun pada praktiknya ditemukan berbeda. Sejumlah peraturan terkait pengadaan barang/jasa telah sedemikian rupa telah diperbaharui dan yang sekarang berlaku adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kontrak dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah dengan spesifikasi alat kesehatan yang melibatkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rasidin Padang dengan PT. Mulia Husada Jaya dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, penulis sangat ingin mengkaji permasalahan ini. Adapun rumusan masalah penelitian ini: 1) Bagaimana keabsahan perjanjian pengadaan alat kesehatan antara RSUD dr. Rasidin Padang dengan PT. Mulya Husada Jaya? 2) Bagaimana akibat hukum dari perjanjian pengadaan alat kesehatan antara RSUD dr. Rasidin Padang dengan PT. Mulya Husada Jaya? Adapun penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal, yaitu peneliti menelaah bahan hukum sekunder kemudian melanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian, penelitian ini bersifat deskriptif dengan sumber data yang bersumber dari narasumber langsung dan dilengkapi dengan studi dokumen dari perpustakaan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadi pertentangan terhadap kontrak yang disepakati kedua belah pihak. Hal ini terbukti bahwa terdapat kelalaian oleh pihak rumah sakit dalam mencantumkan aspek penting yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kata kunci: Perjanjian, Pengadaan barang/jasa Pemerintah, Alat Kesehatan